

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemunculan perbankan syariah memiliki arti penting bagi perkembangan ekonomi islam dibidang kelembagaan khususnya serta kemajuan perekonomian Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara berkembang, dimana sangat ini masih menitikberatkan pada perekonomian yang kuat dan infrastruktur yang jauh lebih baik. Salah satu lembaga yang berpartisipasi dalam kemajuan sistem perekonomian negara adalah Bank Syariah. Dimana bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediary Institution*) bagi sektor-sektor yang ada didalamnya. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha atau kebutuhan konsumtif serta memberikan bentuk pelayanan jasa lainnya, sedangkan tata cara pengoperasiannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam (Al-Qur'an dan Hadist).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Iswandari Mona dan Edy Anan, “Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah : Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.Jurnal JRAK, Volume 11, No1 Februari 2015, Hlm. 32.

Pelopop utama adanya bank syariah adalah didirikannya Bank Muamalat Indonesia yaitu tepat pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Keberadaan Bank Syariah mulai diakui secara formal ketika diberlakukannya Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi lebih kuat.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 dalam pasal 5 ayat 1 terdapat dua jenis Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>3</sup> Pendirian Bank Muamalat diikuti oleh Bank-Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang saat ini diganti nama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS juga ikut andil terhadap pertumbuhan dan kemajuan perekonomian Negara terutama pada lingkup skala ekonomi kecil. Dalam hal ini, pihak BI membuat Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang disebutkan bahwa perekonomian nasional perlu memiliki sistem perbankan syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat

---

<sup>2</sup>Sudarsono Heri, “ *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 4*”. Ekonisia, Yogyakarta, 2013. Hlm. 33-36.

<sup>3</sup>[http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/uu\\_bi\\_1099.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/uu_bi_1099.pdf), diakses pada tanggal 23 oktober 2017, pukul 22.58 wib

dari kalangan menengah kebawah serta kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro secara optimal.<sup>4</sup>

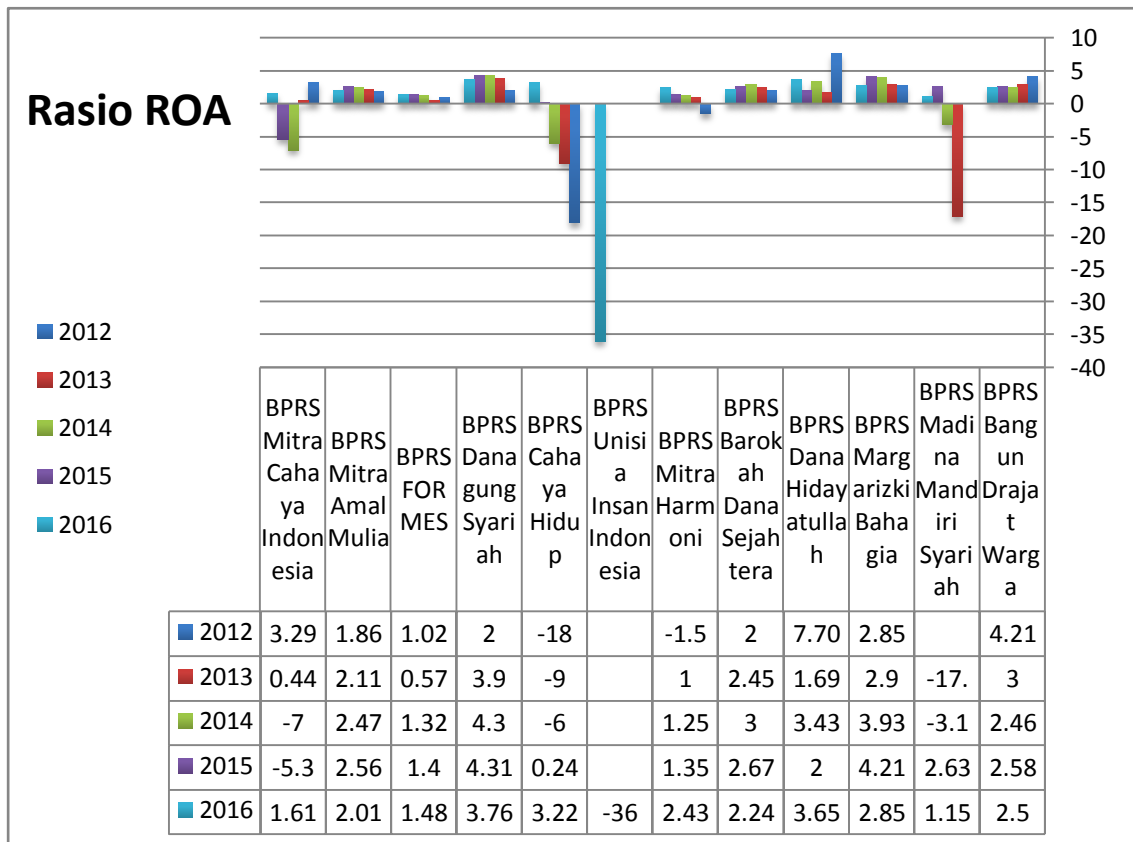
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan melaksanakan bentuk kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah dengan dasar ketentuan kegiatannya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih mudah, cepat serta terhindar dari unsur ribawi. Perkembangan BPRS di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, diketahui dari data statistika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2017 jumlah BPRS di Indonesia menjadi 167 BPRS dengan jumlah 453 jaringan kantor di seluruh Indonesia termasuk di Pulau Jawa.<sup>5</sup>

Untuk menjaga perkembangan usahanya di dalam persaingan yang semakin ketat serta menanggapi akan kebutuhan masyarakat, maka pihak manajemen BPRS di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus memperhatikan tingkat kesehatan keuangannya. Dalam mendeteksi tingkat kesehatan suatu BPRS maka diperlukan sekurang-kurangnya 3 indikator rasio, yaitu : ROA, NPF, dan BOPO, sebagaimana tabel berikut:

---

<sup>4</sup>Yusuf Muhammad Yasir, dan Wan Sri Mahriana, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS) Di Aceh*”.jurnal Iqtishadia, Vol. 9, No. 2, 2016, Hlm. 248.

<sup>5</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada tanggal 26 oktober 2017, pukul 00.11 wib.

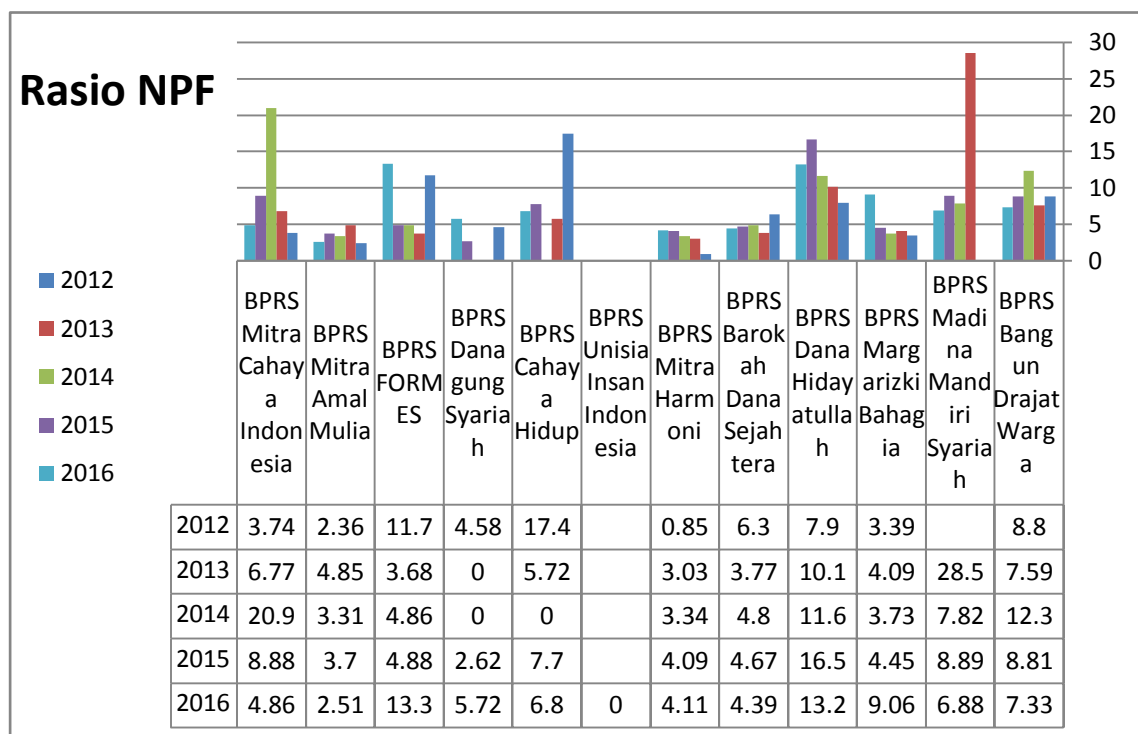


Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan BPRS Margirizki Bahagia

Grafik 1.1 Nilai Rasio ROA BPRS di DIY Periode 2012-2016

Grafik 1.1 menjelaskan masing-masing nilai ROA dari BPRS di DIY selama 5 tahun terakhir. ROA merupakan rasio yang menggambarkan tingkat profitabilitas suatu bank. Terkait batas minimal ROA diatur dalam SEBI Nomor 9/29/Dpbs.2007 yaitu sebesar 1.45%. Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai ROA di masing-masing BPRS mengalami pergerakan yang fluktuatif selama periode 2012-2016. Dari ke-12 BPRS di DIY hanya ada beberapa BPRS yang memiliki nilai ROA di peringkat 1 yang mempunyai arti “*sangat sehat*” selama 5 tahun berturut-turut, antara lain: BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS Margirizki Bahagia, BPRS Dana Hidayatullah, BPRS Barokah Dasa Sejahtera, BPRS Danagung Syariah, BPRS FORMES, dan BPRS Mitra Amal Mulia. Namun,

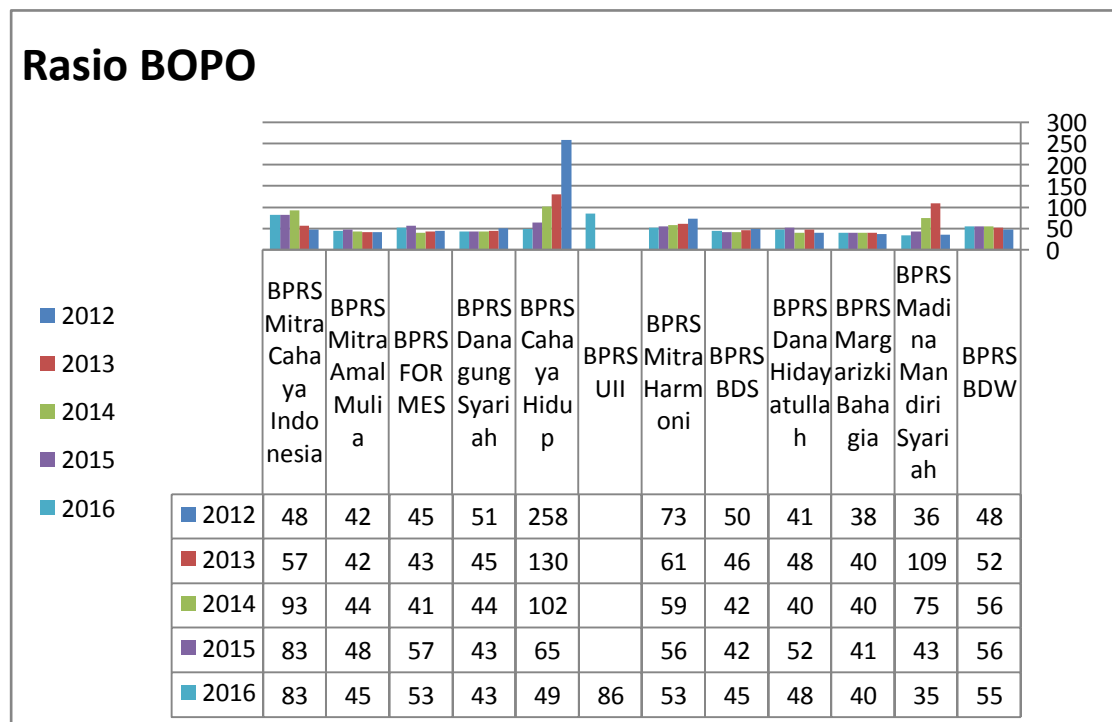
diantara 12 BPRS tersebut ada satu BPRS yang mempunyai nilai ROA sangat tinggi urutan kedua di tiap tahunnya yaitu sebesar 2.85%, 2.9%, 3.93%, dan 4.21, walaupun pada tahun 2016 BPRS tersebut mengalami penurunan menjadi 2.85%. Akan tetapi, status penurunan nilai ROAnya masih dalam kondisi sangat sehat. BPRS yang dimaksud adalah BPRS Margirizki Bahagia. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi profit yang diterima oleh bank.



Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan BPRS Margirizki Bahagia

Grafik 1.2 Nilai Rasio NPF BPRS di DIY Periode 2012-2016

Grafik 1.2 menjelaskan nilai NPF BPRS di DIY selama 5 tahun terakhir. NPF merupakan rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan yang bermasalah. Dari data diatas jika dirata-rata makaada 6 BPRS yang memiliki nilai NPF dikisaran 7% - 10%, hal ini menandakan status pembiayaan BPRS pada peringkat 3 atau “*lancar*”. Hanya ada 2 BPRS yang mengalami pembiayaan bermasalah atau “*kurang lancar*” dikarenakan nilai NPF yang tinggi yaitu berkisar 11% - 13% ini menunjukkan bahwa BPRS berada di peringkat 4. BPRS tersebut adalah PT BPRS Madina Mandiri Syariah dan PT BPRS Dana Hidayatullah yang masing-masing memiliki nilai NPF 13.03% dan 11.89%. Semakin tinggi nilai NPF maka semakin tinggi pula pembiayaan yang bermasalah.



Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan BPRS Margirizki Bahagia.

Grafik 1.3 Nilai Rasio BOPO BPRS di DIY Periode 2012-2016.

Grafik 1.3 menjelaskan nilai BOPO BPRS di DIY selama 5 tahun terakhir. BOPO merupakan rasio untuk mengukur efisiensi operasional BPRS. Dari hasil tabel diatas, diketahui terdapat BPRS yang memiliki nilai BOPO paling kecil jika dibandingkan dengan 11 BPRS lainnya selama periode 2012-2016, yaitu : BPRS Margarizki Bahagia dengan nilai BOPO sebesar 38%, 40%, 40%, 41%, dan 40%. Semakin kecil nilai BOPO maka semakin efisien pihak bank melakukan pengendalian biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Dari hasil 3 rasio diatas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar BPRS di DIY selama 5 tahun terakhir memiliki kemampuan manajemen yang baik. Namun dari 12 BPRS di DIY terdapat salah satu BPRS yang memiliki kinerja keuangan paling baik serta dalam kondisi sangat sehat, meskipun BPRS tersebut berada di posisi ke-2 dari 12 BPRS di DIY, yaitu BPRS Margirizki Bahagia.

Studi ini memilih objek penelitian PT BPRS Margirizki Bahagia dikarenakan BPRS tersebut merupakan pionir pembiayaan berprinsip syariah dan memiliki kinerja keuangan paling baik diperingkat ke-2 selama periode 2012-2016. Dengan nilai rata-rata masing-masing rasio ROA, NPF, dan BOPO adalah 3.34%, 4.94%, dan 40%. Salah satu bentuk informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kinerja dan perkembangan suatu perusahaan adalah laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat berpengaruh dalam memperoleh informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan hasil usaha yang dicapai oleh suatu perusahaan. Laporan Keuangan dilaporkan setiap akhir periode sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan suatu perusahaan. Untuk BPRS, dapat menggunakan standar pelaporan keuangan yaitu berupa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).<sup>6</sup>

Pada tahun 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP pada BPRS berlaku secara efektif mulai per 26 Maret 2015 setelah adanya penetapan tanggal dari SOJK Nomor 9/SEOJK.03/2015.<sup>7</sup> Ruang lingkup penggunaan SAK-ETAP ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Maksud dari Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah suatu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit atau pembiayaan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Senoaji Aditya Rizqy, “*Gap Analysis Penerapan SAK ETAP Pada Penyusunan Laporan Keuangan UKM Di Kabupaten Kudus (Studi pada UKM Padurenan Jaya)*” . Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, 2014. Hlm. 3

<sup>7</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/SEOJK.03/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hlm. 2.

<sup>8</sup><http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailarsip-95> diakses pada tanggal 28 Oktober 2017, pukul 19.32 wib.



Penelitian dipandang perlu, karena BPRS Margirizki Bahagia merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mendapat kepercayaan dari masyarakat menengah ke bawah. Agar kepercayaan terhadap BPRS Margirizki Bahagia tetap terjaga maka diperlukan pengungkapan akuntansi pada laporan keuangan yang sesuai prinsip syariah dan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu SAK ETAP. Alasan BPRS menggunakan aturan SAK ETAP bukan PSAK, karena BPRS bukan sebagai lembaga fidusia serta jangkauan nasabah BPRS yang masih dalam lingkungan masyarakat kecil dan mikro, maka dari itu dibutuhkan susunan laporan keuangan yang lebih mudah, *simple*, tidak rumit dan tidak memberatkan bagi pihak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Analisis Penerapan SAK ETAP Terhadap Penyajian Pengungkapan Laporan Keuangan pada BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimana Penerapan dan Perlakuan Akuntansi atas Pengungkapan Transaksi pada Laporan Keuangan BPRS Margirizki Bahagia?
2. Bagaimana Kesesuaian antara SAK ETAP dengan Penyajian Pengungkapan Laporan Keuangan di BPRS Margirizki Bahagia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan penelitian terhadap topik ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan dan perlakuan Akuntansi atas pengungkapan transaksi pada laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara SAK ETAP dengan penyajian pengungkapan laporan keuangan di BPRS Margirizki Bahagia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a. Memberikan peran pada pengembangan teori akuntansi dan bukti empiris SAK ETAP terhadap pengungkapan laporan keuangan.
- b. Memberikan kontribusi bagi para ahli perbankan syariah khususnya BPRS untuk lebih memperhatikan dalam hal pencatatan aset pada laporan keuangannya.
- c. Mengetahui gambaran secara umum isi perlakuan SAK ETAP.
- d. Menjadi bahan perbandingan antara teori SAK ETAP dengan praktik di lapangan pada BPRS Margirizki Bahagia.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini dilakukan guna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam hal melakukan pengungkapan pada penyajian laporan keuangan atas transaksi-transaksi yang ada dan membantu memahami bagaimana perlakuan akuntansi syariah berbasis SAK ETAP dengan praktik riil di BPRS.

#### **b. Bagi Instansi**

Penelitian ini dilakukan guna untuk membantu lembaga dalam praktik operasionalnya agar bisa lebih sesuai dengan syariah dan benar-benar sesuai dengan perlakuan SAK ETAP mengenai transaksi akuntansi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat

memberikan pengetahuan kepada para staff karyawan secara umum yang ada di BPRS Margirizki Bahagia, dan terkhusus kepada bagian keuangannya agar bisa melakukan pencatatan transaksi secara syariah dan profesional.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Adapun rancangan sistematika pembahasan yang ingin ditulis oleh peneliti sebagai berikut ( Pedoman Penulisan Skripsi, 2017) :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika pembahasan skripsi. Bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan pada bab-bab berikutnya.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Berisi mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori yang relevan serta sesuai tema skripsi yakni berbentuk jurnal ilmiah, hasil penelitian ataupun buku.

### **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti, antara lain : tipe penelitian, jenis data, lokasi penelitian, populasi dan sample, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, dan juga analisis data yang akan digunakan.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi : (1) Hasil penelitian. Klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus

penelitiannya. (2) Pembahasan, mengenai Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan sendiri.

## BAB V: PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.